

ETIKA KEPEMIMPINAN ISLAM DI TENGAH KONTESTASI MORAL: STUDI KASUS GUS MIFTAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Muhammad Pajri Zullian¹, Devina Novela², Aisyah Nur³, Saifullah⁴

¹UIN Imam Bonjol Padang

²UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

^{3,4}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi. E-mail: 2420080070@uinib.ac.id

Abstrak

Fenomena etika kepemimpinan dalam Islam menjadi semakin krusial di tengah dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an dan penerapannya pada kasus Gus Miftah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Al-Ahkam As-Sultaniyyah. Data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) melalui pendekatan deduktif, yakni menarik prinsip-prinsip umum dari teks primer untuk mengkaji fenomena kepemimpinan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip etika kepemimpinan dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan adab berbicara. Dalam kasus Gus Miftah, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip ideal kepemimpinan Qur'ani dengan praktik komunikasi publik yang ditunjukkan, khususnya terkait penghormatan terhadap martabat individu. Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada penguatan konsep etika kepemimpinan Qur'ani berbasis tafsir kontemporer. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi tokoh agama dan pemimpin publik agar lebih peka terhadap etika komunikasi dalam ruang sosial keagamaan.

Kata Kunci: Etika Kepemimpinan, Gus Miftah, Al-Qur'an, Tokoh Publik.

Abstract

The phenomenon of ethical leadership in Islam has become increasingly crucial amid contemporary social dynamics. This study aims to analyze the principles of ethical leadership from the perspective of the Qur'an and their application in the case of Gus Miftah. A descriptive qualitative approach based on library research was employed. Primary sources include the Qur'an, Tafsir al-Azhar by Hamka, and Al-Ahkam As-Sultaniyyah. The data were analyzed using content analysis through a deductive approach—deriving general principles from primary texts to examine contemporary leadership phenomena. The findings reveal that ethical leadership in Islam is grounded in the values of trustworthiness (amanah), justice, consultation (shura), and etiquette in speech. In the case of Gus Miftah, a discrepancy is found between the ideal Qur'anic leadership principles and the public communication practices exhibited, particularly concerning respect for individual dignity. Theoretically, this study contributes to the development of Qur'anic-based ethical leadership frameworks within contemporary exegesis. Practically, it offers insights for religious figures and public leaders to enhance ethical sensitivity and communication standards in social and religious spheres.

Keywords: Leadership Ethics, Gus Miftah, Qur'an, Public Figures.

PENDAHULUAN

Etika dalam kepemimpinan merupakan fondasi utama dalam membentuk peradaban sosial yang adil, inklusif, dan bermartabat. Dalam konteks Islam, kepemimpinan tidak semata-mata dimaknai sebagai struktur kekuasaan administratif, melainkan sebagai amanah ilahiyah yang menuntut tanggung jawab moral, integritas spiritual, dan akhlak al-karimah. Nilai-nilai seperti amanah (tanggung jawab), ‘adl (keadilan), syūrah (musyawarah), dan husn al-khulq (adab dalam berkata dan bertindak) merupakan komponen utama dari kepemimpinan Qur’ani yang diwariskan Rasulullah SAW dan dikembangkan oleh para ulama seperti Al-Mawardi dan Buya Hamka (Qori’ah dan Nurpajar 2024; Sri Mulyani 2022).

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menekankan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Sementara Buya Hamka melalui *Tafsir Al-Azhar* menggarisbawahi bahwa kepemimpinan dalam Islam memerlukan keseimbangan antara kekuatan spiritual, moralitas luhur, dan keberanian sosial. Keteladanan Rasulullah SAW menjadi model dasar yang harus direfleksikan dalam sikap pemimpin terhadap masyarakat, terlebih dalam konteks sosial yang dinamis seperti era digital saat ini (Sakhi, Amin, dan Kurniati 2024).

Fenomena viral yang melibatkan Gus Miftah dalam sebuah acara keagamaan menunjukkan bahwa krisis etika dalam kepemimpinan publik dapat menimbulkan kegaduhan sosial (Kabakoran 2019), meski konteksnya bersifat kasuistik. Dalam sebuah video yang tersebar luas, Gus Miftah menyampaikan kalimat yang dianggap merendahkan kepada seorang pedagang kecil. Meskipun ia telah menyampaikan klarifikasi dan niat awalnya adalah bercanda, reaksi publik menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap etika komunikasi tokoh agama di ruang publik. Penelitian ini tidak bermaksud mengeksplorasi peristiwa tersebut secara sensasional, tetapi menjadikannya sebagai pintu masuk untuk menguji validitas prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam konteks sosial kontemporer.

Kasus ini hanya dikemukakan secara ringkas untuk menunjukkan pentingnya menguji kembali penerapan nilai-nilai etika Qur’ani dalam praktik komunikasi para tokoh publik keagamaan. Dalam masyarakat digital, di mana segala bentuk komunikasi terekam dan tersebar luas (Saragih 2018), setiap ujaran pemimpin tidak lagi bisa dilihat secara eksklusif oleh kalangan terbatas, melainkan menjadi konsumsi dan evaluasi publik yang luas dan cepat. Maka, dibutuhkan pendekatan analitis yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya, psikologi sosial, dan dinamika komunikasi publik.

Secara akademik, penelitian ini berangkat dari kelemahan dalam studi-studi terdahulu yang umumnya bersifat normatif menggambarkan idealisme kepemimpinan Islam tanpa menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bekerja dalam konteks kekinian. Kajian seperti (Siddique, Syed Ali Sultan, dan Dr. Arfan Arshad 2023) serta (Muntatsiroh dan Bustamam 2023) lebih banyak memaparkan kerangka teoritis mengenai karakteristik pemimpin ideal menurut Islam, namun tidak menyentuh implementasi praktisnya dalam interaksi sosial modern.

Demikian pula, studi oleh (Harahap, Nurmaini, dan Marpaung 2023) menekankan pentingnya akhlak dalam kepemimpinan Islam, tetapi tidak mengintegrasikan aspek tafsir sosial dan dinamika komunikasi digital. (Shofiyyah, Komarudin, dan Ulum 2023), juga menyoroti peran moralitas pemimpin Muslim, namun kajiannya belum membahas respons publik terhadap perilaku tokoh agama di media terbuka. Sementara itu, (Faelasup 2023) mengangkat tema tanggung jawab sosial pemimpin Islam, tetapi lebih berfokus pada institusi politik formal, bukan tokoh keagamaan yang berperan dalam ruang publik digital.

Literatur-literatur tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang etika kepemimpinan Islam umumnya masih terjebak dalam kerangka normatif yang idealistik dan belum menawarkan perangkat evaluasi aplikatif, khususnya dalam menilai ujaran tokoh publik di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan tafsir tematik berbasis ayat-

ayat etika Al-Qur'an serta pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan tafsir sosial, komunikasi publik, dan psikologi moral.

Dari sisi metodologis, masih sangat sedikit studi yang menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawdu'i*) berbasis analisis isi (*content analysis*) dengan teknik deduktif untuk menurunkan prinsip-prinsip etika dari Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan fenomena kontemporer. Banyak studi hanya mengutip ayat-ayat tanpa menganalisis konteks sosialnya. Hal ini menjadi gap penting yang berusaha dijawab oleh penelitian ini, yaitu dengan membangun kerangka tafsir yang tidak hanya fokus pada isi pesan ayat, tetapi juga pada respons sosial terhadap implementasinya.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan Qur'ani melalui eksplorasi ayat-ayat yang berisi nilai akhlak al-karimah, 'adl, adab al-hiwar, dan rahmah sebagai pondasi etik pemimpin. Penelitian ini juga mengintegrasikan tafsir sosial dan komunikasi publik untuk memahami dimensi ujaran tokoh agama dalam ruang publik digital. Kajian ini tidak hanya membaca teks, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks penerimaan sosial dan tuntutan etik dari masyarakat terhadap tokoh agama yang menjadi representasi moral komunitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam Al-Qur'an, terutama melalui ayat-ayat yang berisi nilai moral, keadaban berkomunikasi, dan tanggung jawab sosial seorang pemimpin. Kajian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawdu'i*) dengan analisis isi secara deduktif, yakni menarik prinsip umum dari ayat-ayat Al-Qur'an lalu dikontekstualisasikan pada kasus komunikasi tokoh publik. Pendekatan ini dikombinasikan dengan teori kepemimpinan Islam dari Al-Mawardi dan Hamka, serta didukung dengan teori komunikasi elit publik (Hobbs 2022) dan psikologi moral (Tangney, Baumeister, dan Boone 2004).

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus tentang etika kepemimpinan Islam dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan responsif terhadap perkembangan sosial. Dengan mengkaji praktik komunikasi tokoh publik melalui lensa etika Qur'ani, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya metode tafsir kontekstual serta kontribusi praktis dalam membangun kesadaran etik di ruang publik keagamaan. Selain itu, penelitian ini membuka ruang dialog antara teks dan realitas, antara idealisme normatif dan praktik sosial yang penuh tantangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap praktik komunikasi tokoh agama terhadap masyarakat kecil di ruang publik digital? Pertanyaan ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan perilaku sosial pemuka agama, serta sebagai bentuk kontribusi akademik dalam membumikan etika Qur'ani dalam kehidupan kepemimpinan kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (*library research*) (Bungin 2007). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, karya ulama klasik dan modern, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dikontekstualisasikan dalam dinamika komunikasi publik tokoh agama kontemporer.

Penelitian ini bersifat multidisipliner, dengan mengintegrasikan pendekatan etika Islam, komunikasi publik, psikologi sosial, dan sosiologi agama. Pendekatan ini dipilih agar analisis tidak hanya berhenti pada dimensi normatif-teologis, tetapi juga mampu membongkar dinamika sosial-budaya dan implikasi psikologis dari praktik komunikasi tokoh agama dalam masyarakat digital. Dengan demikian, kerangka teoritik yang digunakan tidak hanya berasal dari pemikiran tokoh Islam seperti (Al-Mawardi 2018) dan Buya Hamka (Sri Mulyani 2022), tetapi juga diperkuat oleh teori *self-*

regulation (Tangney dkk. 2004), *public accountability*, serta konsep komunikasi elit publik (Hobbs 2022).

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi teks-teks primer seperti Al-Qur'an, Al-Ahkam As-Sultaniyyah karya Al-Mawardi, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Amrullah 1990), yang dianalisis untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika kepemimpinan Islam. Selain itu, sumber sekunder yang digunakan mencakup artikel jurnal akademik, buku-buku ilmiah, laporan media terpercaya, serta hasil penelitian terkait perilaku komunikasi tokoh publik, terutama dalam konteks media sosial dan dakwah kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan metode content analysis (analisis isi) dan pendekatan deduktif. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) identifikasi prinsip etika kepemimpinan dari teks-teks primer, (2) pengkodean tema kunci seperti amanah, hikmah, empati, adab berbicara, dan kontrol diri, (3) pengorganisasian tema ke dalam kerangka analisis multidisipliner, dan (4) penerapan prinsip-prinsip tersebut pada kasus Gus Miftah yang dianalisis sebagai studi sosial-komunikatif keagamaan.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi silang antara teks keagamaan, teori ilmiah lintas disiplin, serta sumber aktual yang melaporkan dinamika sosial kasus. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis terhadap ujaran publik tokoh agama di media terbuka, tanpa menyentuh aspek personal atau intensi subjektif yang tidak terdokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam diterapkan dalam praktik komunikasi sosial tokoh agama di ruang publik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an

Etika dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral pribadi (Rusnadi dan Hafidhah 2019), tetapi juga sebagai pedoman sosial dan politik (Sadra, Wahyudi, dan Wahyudi 2024). Al-Qur'an menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam urusan administratif, tetapi juga dalam menjaga keadilan, kemaslahatan umat, serta menunjukkan empati dan kasih sayang kepada masyarakat, terutama kepada golongan yang lemah dan terpinggirkan (Suharnia Wati dkk. 2024).

Dalam Surah An-Nisa (4):58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan landasan utama dalam struktur sosial-politik Islam, menempatkannya sebagai prinsip tak tergantikan dalam menjalankan kekuasaan. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya berkewajiban menjaga hak-hak masyarakat secara umum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara dan kepentingan mereka yang berada di lapisan bawah tidak terpinggirkan (Setiawan dan Fauzi 2019). Penekanan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak bersifat elitis, melainkan inklusif dan transformatif.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga memuat nilai-nilai empati dan kasih sayang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam Surah At-Tawbah (9):128 disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat peduli terhadap penderitaan umat:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.”(QS. At-Tawbah: 128)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati dalam Islam tidak boleh bersikap kasar atau menyakiti perasaan masyarakat, terlebih jika mereka berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Tindakan semacam itu bukan hanya mencederai nilai-nilai kepemimpinan profetik, tetapi juga berpotensi memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat. Dalam konteks ini, kepekaan sosial menjadi tolok ukur penting bagi seorang pemimpin dalam meneladani prinsip kasih sayang dan keadilan yang diajarkan Al-Qur’an (Rashid 2015; Widayat 2014).

Nilai kelembutan dalam kepemimpinan ditegaskan pula dalam Surah Ali Imran (3):159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran: 159)

Ayat ini memperkuat bahwa sikap kasar, bahkan jika dilakukan dalam konteks bercanda, dapat merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Tindakan semacam itu bukan hanya berisiko menimbulkan luka sosial, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan sensitivitas tokoh tersebut. Hal ini menandakan bahwa dalam perspektif Al-Qur’an, adab dan tutur kata pemimpin mencerminkan kualitas moral serta kesadaran sosialnya terhadap kondisi umat (Hidayat 2019; Muhammad Syarif 2023).

Ketiga ayat tersebut menjadi landasan normatif etika sosial dan politik dalam Islam. Pemimpin bukan hanya dipilih untuk memimpin, tetapi untuk melayani dengan adil, penuh kasih sayang, dan menjadi figur yang mampu menjaga harmoni sosial. Kepemimpinan dalam perspektif ini menuntut kepekaan terhadap suara rakyat, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Keadilan bukan sekadar prinsip hukum, tetapi nilai moral yang hidup dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat.

Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka yang terancam bukan hanya stabilitas sosial, tetapi juga legitimasi moral seorang pemimpin. Ketika tokoh agama maupun pemimpin politik menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan empati dan adab, krisis kepercayaan publik sangat mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, integritas bukan hanya soal personal, tetapi juga tanggung jawab sosial yang melekat pada jabatan publik.

Analisis Kasus Gus Miftah dalam Perspektif Al-Qur’an

Pada tanggal 20 November 2024, dalam acara "Magelang Bersholawat" yang digelar di Lapangan Soepardi, Magelang, Gus Miftah seorang pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama terlibat dalam interaksi dengan seorang pedagang es teh bernama Sunhaji. Dari atas panggung, Gus Miftah menyapa sang pedagang dengan mengatakan, “Es tehmu jik okeh ra?” (Es teh kamu masih banyak tidak?), yang dijawab dengan anggukan. Gus Miftah melanjutkan, “Masih? Ya kono didol, goblok!” diikuti dengan kalimat, “Dol'en ndisik, ngko lak rung payu, yo wis, takdir.” Perkataan tersebut disambut tawa oleh sebagian hadirin, namun juga menuai reaksi keras dari masyarakat luas.

Penting untuk mencermati konteks budaya dan bahasa lokal sebelum menyimpulkan secara moralistik. Dalam budaya Jawa, khususnya dalam interaksi informal, penggunaan kata seperti “goblok” dapat memiliki konotasi yang lebih cair sebagai bagian dari gaya bercanda antar teman akrab. Gus

Miftah, dalam klarifikasinya yang dimuat oleh Katadata.co.id, menegaskan bahwa ia tidak berniat menghina, melainkan bercanda karena sudah mengenal Sunhaji secara personal. Sunhaji sendiri mengaku tidak tersinggung dan menganggap interaksi tersebut wajar karena kedekatan mereka (Rosman 2024).

Namun demikian, meski konteks budaya dan relasi personal bisa menjadi faktor pemakluman secara lokal, seorang tokoh publik tetap perlu memahami bahwa ruang publik saat ini bersifat digital dan terbuka. Dalam budaya digital, publik bukan hanya penonton langsung, tetapi juga mereka yang menyaksikan lewat potongan video dan tanpa konteks penuh (Livingstone 2015). Di sinilah tantangan baru kepemimpinan agama muncul bagaimana menjaga gaya komunikasi yang tetap ramah konteks namun tidak kontraproduktif secara etis di mata publik yang lebih luas dan beragam.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, nilai-nilai adab dalam komunikasi sangat ditekankan. QS. Al-Hujurat (49):11 melarang saling merendahkan dan memanggil dengan sebutan buruk, sementara QS. Al-Isra' (17):53 memerintahkan untuk berbicara dengan kata-kata terbaik agar tidak memicu permusuhan. Tafsir Al-Azhar karya Hamka menekankan bahwa kata-kata yang tampak biasa dalam pergaulan bisa menjadi penyebab perpecahan jika diucapkan tanpa empati dan sensitivitas publik (Amrullah 1990). Dalam konteks ini, penting bagi tokoh agama untuk mempertimbangkan bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana itu dipahami publik.

Hamka juga menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus dibangun di atas tiga pilar: spiritualitas, moralitas, dan kekuatan sosial-fisik (Amrullah 1990; Sri Mulyani 2022). Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kharisma dan jaringan sosial, tetapi juga harus menjadi cermin dari nilai-nilai luhur Islam. Dalam kasus ini, meskipun Gus Miftah dikenal karena pendekatannya yang populis dan dekat dengan masyarakat lapis bawah, hal itu tetap perlu dikawal dengan kehati-hatian etis dalam berbicara di ruang publik yang lebih luas dari sekadar lapangan dakwah.

Pandangan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah juga relevan. Ia menyatakan bahwa pemimpin adalah penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan (Al-Mawardi 2018). Amanah tidak hanya ditunaikan melalui keputusan administratif, tetapi juga melalui integritas dalam sikap dan ucapan. Dalam konteks kontemporer, di mana seorang tokoh agama juga berfungsi sebagai simbol moral umat, kelalaian dalam komunikasi bisa dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip *'adl* (keadilan sosial) dan hikmah (kebijaksanaan).

Meski demikian, perbandingan antara Gus Miftah dan Buya Yahya harus ditempatkan secara proporsional. Buya Yahya dikenal dengan pendekatan dakwah yang formal, sistematis, dan berbasis lembaga pesantren. Gaya retorikanya halus dan sangat terstruktur karena audiensnya sering berasal dari kalangan santri atau masyarakat religius yang mapan (Ridwan 2019). Sebaliknya, Gus Miftah banyak berdakwah di ruang-ruang publik yang tidak formal, seperti di lingkungan hiburan malam, pesantren rehabilitasi, atau acara rakyat. Maka, gaya komunikasinya pun lebih cair, spontan, dan berbasis pada jangkauan massa yang luas dan heterogen. Keduanya menampilkan wajah berbeda dari dakwah Islam, dan keduanya tetap memiliki tempat selama etika dasar tetap dijaga.

Namun demikian, gaya komunikasi yang santai tetap tidak membenarkan ucapan yang berpotensi melecehkan martabat seseorang, terutama dalam struktur sosial yang timpang. Dalam ruang publik yang kian terbuka, pemimpin agama harus menumbuhkan kepekaan terhadap kelompok rentan. Ungkapan yang mungkin dianggap lucu dalam satu komunitas bisa berubah menjadi simbol pelecehan dalam ruang digital yang luas.

Respons publik melalui media sosial dan pemberitaan menunjukkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap tokoh agama. Komentar-komentar yang mengecam ucapan Gus Miftah menandakan kesadaran kolektif baru terhadap etika kepemimpinan. Publik kini tidak hanya menilai isi ceramah, tetapi juga cara penyampaiannya. Ini menjadi refleksi bahwa krisis keteladanan bukan hanya soal moralitas pribadi, tetapi juga soal komunikasi publik yang manusiawi.

Dampak sosial dari insiden ini cukup signifikan. Secara konkret, terjadi penurunan kepercayaan dari sebagian masyarakat terhadap tokoh agama yang dinilai terlalu bebas berbicara. Selain itu, institusi keagamaan yang terkait dengan Gus Miftah turut terdampak secara citra karena dianggap membiarkan gaya komunikasi yang tidak sesuai dengan prinsip dakwah rahmatan lil ‘alamin. Media sosial menjadi arena kontrol sosial baru yang memperlihatkan bahwa pelanggaran etika verbal dapat berakibat pada delegitimasi moral secara kolektif.

Di sisi lain, kasus ini juga membuka diskusi penting tentang pembaruan etika dakwah di era digital. Dakwah bukan hanya menyampaikan isi ajaran Islam, tetapi juga menyampaikan nilai dalam cara. Ketika tokoh agama tampil di panggung digital, setiap kata menjadi dokumentasi publik yang melekat. Oleh karena itu, penting bagi tokoh publik untuk menyeimbangkan antara spontanitas, humor, dan kehormatan lisan.

Sebagai penutup, kasus ini bukan semata-mata soal “goblok” atau tidak, tetapi tentang standar ganda yang sering kita lihat dalam dunia dakwah. Gus Miftah, seperti tokoh lainnya, tetap manusia yang bisa salah. Tetapi sebagai simbol moral, setiap kesalahan apalagi yang viral perlu ditanggapi dengan evaluasi, bukan sekadar klarifikasi. Islam tidak melarang bercanda, tapi menegaskan batas adabnya. QS. Ali Imran (3):159 mengajarkan bahwa keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membina umat bukan hanya karena wahyu yang dibawa, tetapi karena kelembutan dan keteladanan pribadinya.

Refleksi dan Implikasi Etika Kepemimpinan dalam Al-Qur’an

Kasus Gus Miftah memperlihatkan bagaimana pelanggaran etika komunikasi oleh tokoh agama berdampak luas, tidak hanya terhadap individu yang terlibat langsung, tetapi juga terhadap persepsi kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam. Dalam tradisi Islam, kepemimpinan bukan sekadar posisi sosial, tetapi amanah moral yang menyatu dengan fungsi dakwah dan keteladanan (Mulyanty, Hamdanah, dan Fahmi 2024). Dalam konteks sosial digital saat ini, ucapan tokoh agama menjadi konsumsi publik lintas ruang, dan karena itu memerlukan kontrol etis yang lebih ketat.

QS. Ali ‘Imran (3):159 sering dikutip untuk menggambarkan kelembutan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Namun ayat ini, jika ditafsir lebih mendalam sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, tidak hanya memuat ajakan untuk bersikap lembut, tetapi juga mengandung prinsip kejujuran, empati, dan keberanian moral dalam menanggapi kesalahan umat. Kelembutan bukan berarti permisif atau kehilangan ketegasan, tetapi kemampuan untuk mengkomunikasikan kebenaran dengan cara yang tidak melukai dan di sinilah letak tantangan etis tokoh publik saat ini (Al Baihaqi 2022).

Pendekatan komunikasi publik dan psikologi sosial menjelaskan bahwa ucapan kasar, meskipun dalam konteks bercanda, dapat menciptakan luka simbolik yang melampaui ruang pribadi. Kata-kata seperti “goblok” yang diucapkan di atas panggung dengan penguatan suara, disaksikan ribuan orang secara langsung dan digital, membawa dampak sosial yang kompleks. Ucapan tersebut membentuk persepsi kolektif bahwa tokoh agama memiliki otoritas untuk melecehkan secara verbal. Di sinilah komunikasi publik memerlukan sensitivitas moral, karena peran pemimpin tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan makna sosial yang akan diterjemahkan publik secara luas.

Walaupun Gus Miftah telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, serta memberikan hadiah umrah kepada pedagang yang terlibat, langkah tersebut perlu dianalisis lebih dalam dalam kerangka rekonsiliasi etis. Dalam teori etika Islam dan psikologi rekonsiliasi, permintaan maaf yang diterima secara publik belum tentu menyembuhkan luka sosial, terutama jika tidak disertai dengan transformasi sikap jangka panjang. Hadiah material, meskipun berharga, tidak bisa menggantikan kebutuhan publik akan pengakuan moral dan perbaikan etis yang konsisten.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap peristiwa tersebut tidak boleh berhenti pada insiden dan klarifikasi semata. Lebih penting lagi adalah menilai bagaimana tokoh agama memaknai ulang peran mereka di tengah masyarakat yang semakin kritis dan berpendidikan. Apakah permintaan maaf hanya sebagai manuver reputasi, atau sebagai titik balik untuk merefleksikan gaya komunikasi dan

membangun keteladanan yang lebih kuat? Di sinilah pentingnya memberi ruang bagi transformasi moral, bukan sekadar pemberian maaf simbolik.

Respons publik terhadap insiden tersebut menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara masyarakat menilai tokoh agama. Di era keterbukaan informasi, masyarakat kini menuntut keselarasan antara ucapan dan tindakan, serta tidak lagi menerima otoritas religius secara simbolik tanpa evaluasi kritis. Reaksi keras di media sosial terhadap ucapan Gus Miftah yang dianggap merendahkan, sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com (5 Desember 2024), menandakan bahwa legitimasi tokoh agama kini lebih ditentukan oleh integritas moral yang teruji secara sosial, bukan semata status keulamaan. Dalam beberapa kanal berita Islam, bahkan dilaporkan adanya survei kecil yang menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap tokoh agama yang terlibat dalam kontroversi verbal. Hal ini menguatkan bahwa ruang publik keagamaan telah berpindah dari basis karisma menuju tuntutan etika substantif.

Namun demikian, penting untuk tidak menjadikan satu kesalahan sebagai penanda totalitas. Islam sendiri memberi ruang luas untuk taubat dan islah (perbaikan diri). Kasus Gus Miftah, jika direspons secara bijak dan reflektif, dapat menjadi momen pertumbuhan moral bagi tokoh agama dan pelajaran publik tentang pentingnya adab dalam kepemimpinan. Alih-alih menjatuhkan, publik perlu mendorong lahirnya sikap tanggung jawab jangka panjang dari para pemuka agama, agar dakwah tetap menjadi jalan pencerahan, bukan sumber luka sosial.

Akhirnya, pelajaran utama dari kasus ini bukan hanya tentang satu kata yang kontroversial, tetapi tentang sistem nilai yang menyertai kepemimpinan Islam. Seorang dai bukan hanya penyampai pesan, melainkan wajah dari pesan itu sendiri. Maka, menjaga integritas, kelembutan, keberanian, dan kejujuran dalam berkomunikasi menjadi fondasi etika kepemimpinan yang harus dijaga. Hanya dengan demikian, dakwah dapat menyentuh hati tanpa mencederai, dan menjadi jembatan spiritual antara ajaran dan kehidupan nyata umat.

Kesenjangan antara Teori dan Praktik Etika Kepemimpinan

Kasus yang melibatkan Gus Miftah dalam interaksinya dengan seorang pedagang es teh menjadi momen reflektif tentang bagaimana prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam diuji dalam praktik nyata. Ucapan spontan seorang tokoh agama di ruang publik, meskipun bersifat candaan, dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan karena posisi dan pengaruh yang melekat pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi pemimpin dalam Islam bukan hanya soal kapasitas ceramah atau posisi simbolik, tetapi tentang seberapa dalam nilai-nilai keadilan, empati, dan hikmah diinternalisasi dalam perilaku (Rusnadi dan Hafidhah 2019).

Secara teoritis, Islam memiliki warisan konsep kepemimpinan yang sangat kaya. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menekankan pentingnya *‘adl* (keadilan) dan *hikmah* (kebijaksanaan) dalam segala tindakan pemimpin (Al-Mawardi 2018). Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menyebutkan bahwa pemimpin yang sejati harus memiliki spiritualitas, moralitas, dan kekuatan sosial yang seimbang (Amrullah 1990). Namun, seperti yang tergambar dalam kasus ini, terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai tersebut dengan laku tokoh agama di ruang publik. Fenomena ini bukan semata soal kesalahan individu, melainkan menunjukkan adanya kesenjangan sistemik antara ajaran dan praktik.

Tanggapan publik terhadap kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menerima sikap tokoh agama tanpa kritik. Di era digital, setiap tindakan pemimpin termasuk gaya bicara akan ditafsirkan ulang secara massal dan cepat oleh publik yang kritis. Di sinilah pentingnya pendekatan komunikasi publik dalam memahami dinamika kepemimpinan keagamaan. Ujaran seperti “goblok” yang dikatakan oleh tokoh agama dapat dipersepsikan bukan sekadar guyonan, tetapi sebagai bentuk simbolik kekuasaan yang melecehkan masyarakat kecil. Komunikasi publik berbasis empati menjadi krusial dalam menjembatani kekuasaan dan moralitas.

Studi Hobbs & McClure menunjukkan bahwa dalam masyarakat digital, gaya komunikasi elit publik berkontribusi besar pada pembentukan budaya keteladanan atau justru ketimpangan simbolik (Hobbs 2022). Ketika bahasa kasar digunakan oleh figur publik, ia melegitimasi wacana dominasi atas kelompok rentan. Maka, kasus Gus Miftah bukan hanya soal satu kata yang menyinggung, tetapi memperlihatkan bagaimana ujaran publik memproduksi ketimpangan baru yang tidak selalu disadari oleh pelakunya.

Lebih jauh, ketidakseimbangan antara teori dan praktik etika kepemimpinan juga bersumber dari lemahnya kontrol etik di lembaga keagamaan itu sendiri. Penelitian Nuraini menemukan bahwa sebagian besar ormas Islam dan lembaga dakwah di Indonesia belum memiliki sistem pengawasan internal yang mapan untuk mengevaluasi perilaku publik para penceramahnya (Nuraini, Waharjani, dan Jailani 2024). Ketiadaan forum etik independen menjadikan kritik publik melalui media sosial menjadi satu-satunya jalur kontrol sosial, yang sayangnya seringkali tidak terstruktur dan hanya bersifat reaktif.

Dalam konteks inilah pendekatan sosiologis menjadi penting. Karakter masyarakat patron-klien di Indonesia menyebabkan tokoh agama seringkali dikultuskan, sementara pelanggaran etika dianggap hal kecil selama tokoh tersebut masih memenuhi ekspektasi simbolik umat. Ini menghambat evaluasi yang sehat terhadap pemimpin. Maka dari itu, diperlukan sistem pembinaan yang tidak hanya menekankan popularitas atau loyalitas jamaah, tetapi juga mekanisme evaluasi moral yang objektif dan terstandar.

Solusi terhadap kesenjangan ini tidak cukup bersifat personal dan normatif, melainkan harus disertai dengan transformasi struktural. Salah satunya dengan mendorong ormas Islam dan lembaga dakwah membentuk Dewan Etik Komunikasi Publik yang bertugas menyusun pedoman komunikasi untuk tokoh agama, termasuk penanganan pelanggaran verbal secara preventif dan korektif. Ini menjadi penting agar citra Islam sebagai rahmat bagi semesta tidak tercederai oleh ucapan personal yang tidak terkendali.

Pendekatan multidisipliner juga sangat relevan dalam menjembatani teori dan praktik kepemimpinan Islam. Psikologi sosial, misalnya, menawarkan konsep *self-regulation dan public accountability* (Tangney dkk. 2004) untuk menjelaskan pentingnya pengendalian diri pemimpin dalam situasi publik. Di sisi lain, komunikasi publik menekankan bahwa ujaran publik tidak pernah bebas nilai; setiap kata yang keluar dari tokoh agama akan menjadi penanda moral di tengah masyarakat.

Dalam kerangka ini, permintaan maaf dan pemberian hadiah umrah oleh Gus Miftah, meskipun penting sebagai bentuk tanggung jawab, belum cukup untuk menyelesaikan persoalan etika secara utuh. Publik juga menilai apakah permintaan maaf itu diiringi dengan kesadaran moral yang dalam atau sekadar langkah meredakan kontroversi. Maka, rekonsiliasi etis tidak hanya memerlukan simbol, tetapi juga reformasi sikap dan komitmen perubahan jangka panjang.

Selain itu, media keagamaan dan lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis untuk memperkuat literasi etika kepemimpinan. Kurikulum pesantren dan kampus dakwah perlu mengintegrasikan pelatihan komunikasi publik, literasi digital, dan empati sosial sebagai bagian dari kompetensi dakwah. Ini akan memperluas definisi keteladanan dari sekadar penguasaan teks ke penguasaan konteks dan emosi sosial.

Namun demikian, analisis ini juga mengakui bahwa ruang perbaikan selalu terbuka. Islam memberikan tempat yang luas untuk taubat, islah, dan transformasi moral. Tokoh agama yang bersalah tetap memiliki peluang untuk memperbaiki diri secara nyata dan menjadi contoh proses pemulihan etis. Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tetap mendorong proses pertumbuhan moral tokoh publik tanpa menjerumuskan mereka pada stigma permanen yang destruktif.

Penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa tantangan utama etika kepemimpinan Islam hari ini bukan terletak pada kelangkaan teori, melainkan pada disiplin moral dalam menerapkannya. Integrasi antara nilai dan tindakan harus dibangun tidak hanya dalam ceramah, tetapi dalam kontrol sosial, sistem kelembagaan, dan desain pelatihan dakwah. Hanya dengan pendekatan yang

komprehensif inilah krisis keteladanan dapat diatasi dan kepemimpinan Islam kembali hadir sebagai inspirasi etis di ruang publik yang semakin dinamis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tindakan verbal tokoh publik terhadap masyarakat kecil, seperti yang terjadi dalam kasus Gus Miftah, menunjukkan ketidaksesuaian antara perilaku tokoh agama dan prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir para ulama seperti Fakhruddin al-Razi dan Quraish Shihab terhadap QS Ali 'Imran (3):159, kepemimpinan yang Qur'ani mengedepankan sikap lemah lembut, empati, musyawarah, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Ujaran yang kasar, meskipun dimaksudkan sebagai candaan, tidak dapat dibenarkan secara etik karena berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap tokoh agama dan mencederai nilai-nilai keteladanan yang diembannya.

Melalui pendekatan teori Al-Mawardi dan Buya Hamka, serta perbandingan dengan tokoh seperti Buya Yahya, penelitian ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Islam menuntut konsistensi moral dalam ucapan dan tindakan. Buya Yahya dengan gaya komunikasi yang santun dan beradab memberikan contoh bahwa ketegasan dalam dakwah tidak harus disampaikan dengan gaya konfrontatif. Tokoh publik di era digital memiliki tanggung jawab lebih besar karena setiap kata yang diucapkan berpotensi menjadi representasi moral umat di ruang sosial yang luas dan sensitif. Selain prinsip-prinsip Qur'ani dan tafsir etis, penelitian ini juga menempatkan teori komunikasi publik dan psikologi moral sebagai landasan analitik. Dari sudut komunikasi elit publik, ujaran tokoh agama tidak bisa dilepaskan dari pengaruh simbolik dan dampaknya terhadap persepsi kolektif. Sementara itu, psikologi moral menekankan pentingnya *self-regulation dan public accountability* sebagai indikator keberhasilan etika kepemimpinan. Ketika pemimpin gagal mengendalikan ekspresi verbalnya, apalagi di ruang publik, hal itu mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dalam konteks sosial modern.

Respon publik terhadap kasus ini juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari otoritas simbolik menuju otoritas berbasis moral. Pemberitaan media seperti Kompas.com mengungkap teguran dari tokoh nasional dan maraknya kecaman sosial di media digital, yang menandakan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keteladanan figur publik. Masyarakat kini menilai bukan hanya isi dakwah, tetapi cara penyampaiannya, serta sejauh mana tokoh agama benar-benar mewujudkan nilai-nilai Islam dalam praktik sosialnya. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan utama penelitian ini menegaskan bahwa tindakan verbal tokoh agama harus tunduk pada prinsip etika kepemimpinan dalam Islam. Internalitas nilai adab, empati, dan sensitivitas sosial menjadi fondasi utama dalam menjaga marwah kepemimpinan di era keterbukaan digital. Tokoh agama tidak hanya diukur dari kekuatan retorika, tetapi dari integritas lisan dan konsistensi moral dalam perilaku keseharian..

DAFTAR PUSTAKA

- Al Baihaqi, Muhammad Dzilfikri. 2022. "Unveiling the Implicit Message: A Comprehensive Exploration of Qur'anic Democracy Using Ma'na-Cum-Maghza Approach." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 23(2):391–416. doi: 10.14421/qh.v23i2.4616.
- Al-Mawardi, Abul Hasan. 2018. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. 1990. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Faelasup. 2023. "Pendidikan Politik Dalam Perspektif Qur'an: Implementasi Pembentukan Budaya Politik Masyarakat Beradab." *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2(1):147–62. doi: 10.57248/jishum.v2i1.286.
- Harahap, Hasriyati, Ella Nurmaini, dan Syafril Fadillah Marpaung. 2023. "Etika Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam." 1(2).
- Hidayat, Rofiq. 2019. "Etika Komunikasi Pemimpin Perspektif Hadits." *Indonesian Journal of Islamic Communication* 2(2):105–30. doi: 10.35719/ijic.v2i2.505.
- Hobbs, Renee. 2022. "Postman's Legacy In A 'Post-Truth' Landscape Of Algorithmic Propaganda."
- Kabakoran, Abu Bakar. 2019. "MEMBUMIKAN ISLAM DALAM KEINDONESIAN KITA." (2).
- Kementerian Agama, RI. 2019. "Qur'an Kemenag." Diambil 11 Mei 2025 (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>).
- Livingstone, Sonia. 2015. "Audiences and Publics: Reflections on the Growing Importance of Mediated Participation." Hlm. 132–40 dalam *Can the Media Serve Democracy?*, disunting oleh S. Coleman, G. Moss, dan K. Parry. London: Palgrave Macmillan UK.
- Muhammad Syarif. 2023. "Ethics of Leadership Communication in Islam." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1(2):91–95. doi: 10.58738/qanun.v1i2.154.
- Muliyanty, Irka, Hamdanah Hamdanah, dan Noor Fahmi. 2024. "Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan." *Journal on Education* 6(4):20928–35. doi: 10.31004/joe.v6i4.6226.
- Muntatsiroh, Addurorul, dan Risman Bustamam. 2023. "Kriteria Dan Akhlaq Pemimpin Yang Baik Dalam Islam." *Jurnal Economic Edu* 4(1):1–10. doi: 10.36085/jee.v4i1.5352.
- Nuraini, Nuraini, Waharjani Waharjani, dan Mohammad Jailani. 2024. "From Textual To Contextual: Contemporary Islamic Thinker Abdullah Saeed On Qur'anic Exegesis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 21(1):32–49. doi: 10.22373/jim.v21i1.19639.
- Qori'ah, Hidayatul, dan Dani Nurpajar. 2024. "Etika Kepemimpinan dalam Tafsir al-Mizan Karya Muhammad Husain Thabathaba'i."
- Rashid, Adnan Abd. 2015. "Self Awareness of a Leader in Islam: Ideal and Possibility." 4.
- Ridwan, Taufik. 2019. "Studi Deskriptif Program Tahsin Al-Qur'an Metode Tashili Di Lembaga Pengembangan Dakwah (Lpd) Al-Bahjah Kabupaten Cirebon." *Syntax Idea* 1(3):101–20. doi: 10.46799/syntax-idea.v1i3.29.
- Rosman, Ameidyo Daud Nasution, Ade. 2024. "Kronologi Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, Berujung Teguran Istana hingga Kecamatan - Nasional Katadata.co.id." Diambil 15 Februari 2025 (<https://katadata.co.id/berita/nasional/674fdd076e127/kronologi-gus-miftah-hina-penjual-es-teh-berujung-teguran-istana-hingga-kecamatan>).
- Rusnadi, Rusnadi, dan Hafidhah Hafidhah. 2019. "Nilai Dasar Dan Moralitas Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 16(2):223–44. doi: 10.14421/jpai.2019.162-06.
- Sadra, Mulla, A. Wahyudi, dan Kurniati Wahyudi. 2024. "Pemahaman Etika Dalam Pengelolaan Lembaga Eksekutif Dalam Politik Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 3(2):126–35. doi: 10.58540/jipsi.v3i2.588.

- Sakhi, Dwi Fa'yi Arya, Putri Aprilyana Idi Amin, dan Kurniati Kurniati. 2024. "Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10(2):95–106. doi: 10.37567/jif.v10i2.3052.
- Saragih, M. Yoserizal. 2018. "Jurnalisme: Harapan Dan Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Mendidik Masyarakat." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 14(1):25–38. doi: 10.54069/attaqwa.v14i1.29.
- Setiawan, Anang, dan Erinda Alfiani Fauzi. 2019. "Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 1(1):1–12. doi: 10.18196/jpk.v1i1.7614.
- Shofiyah, Nilna Azizatus, Tedy Sutandy Komarudin, dan Miftahul Ulum. 2023. "Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(2):66–77. doi: 10.19109/elidare.v9i2.19383.
- Siddiqie, Muhammad Usman, Syed Ali Sultan, dan Dr. Arfan Arshad. 2023. "A Study of Islamic Perspective on Leadership." *Al-NASR* 58–72. doi: 10.53762/alnasr.02.03.e05.
- Sri Mulyani. 2022. "Karakteristik Kepemimpinan Islami Menurut Prof Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 3(1):65–73. doi: 10.55210/arrribhu.v3i1.809.
- Suharnia Wati, Cinta Bayduri Filzah, Taufiq Adek Angga, dan Jendri Jendri. 2024. "Pemimpin Ideal dalam Cahaya Al Qur'an." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2(1):287–98. doi: 10.61132/akhlak.v2i1.390.
- Tangney, June P., Roy F. Baumeister, dan Angie Luzio Boone. 2004. "High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success." *Journal of Personality* 72(2):271–324. doi: 10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x.
- Widayat, Prabowo Adi. 2014. "Kepemimpinan Profetik: Rekonstruksi Model Kepemimpinan Berkarakter Keindonesiaan." 19(01).